

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Australia adalah sebuah negara yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia, wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitarnya. Australia berasal dari kata *Australis* yang dalam bahasa latin berarti selatan. Kata *Australische* dalam bahasa Belanda digunakan untuk menyebut daerah yang baru ditemukan di selatan. Kata Australia dalam bahasa Inggris pertama kali dipakai Alexander Darymple pada 1771 dalam bukunya yang berjudul *An Historical Collection Of Voyages and Discoveries in the South Pacific Ocean*, namun masih menunjukkan seluruh kawasan Pasifik Selatan.¹

Australia adalah sebuah benua yang terletak dekat dengan benua Asia, namun Australia lebih sering disebut sebagai bagian dari dunia Barat karena kehidupannya yang mirip Eropa Barat dan Amerika Serikat. Penduduknya pun sebagian besar berkulit putih, sedangkan penduduk asli Australia yakni orang-orang Aborigin adalah orang-orang Australia pertama yang benar-benar menghuni benua itu.²

¹ Hidayat. F.A dan H.G.Aburasyid, *Ensiklopedia: Negara-Negara di Dunia*, Bandung: CV Pustaka Grafika, 2007, hlm. 58.

² Mereka diperkirakan berasal dari daratan Asia Tenggara sebelum pindah ke benua Australia lebih dari 40.000 tahun yang lampau. Lihat Kedutaan Besar Australia, *Hubungan Indonesia-Australia Ceramah Sir Keith Shann: Tetangga*, Jakarta: Kantor Penerangan Australia, 1981, hlm. 8.

Australia menjadi negara federal sejak tahun 1901, dengan sistem pemerintahan parlementer dan pengalaman demokrasi yang cukup panjang. Sistem politik Australia dapat digolongkan sebagai sistem politik barat, parlementer, dan demokratis. Tujuh pemerintahan yaitu satu federal dan enam negara bagian, mempunyai Parlemen *Bicameral*³ yang dipilih oleh rakyat secara berkala atas dasar hak pilih universal.⁴ Pada bentuk negara federal ini memungkinkan untuk negara bagian untuk mengatur politik lokal masing-masing.

Konstitusi persemakmuran Australia⁵ menciptakan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Konstitusi tersebut menyebutkan tiga jenis kekuasaan :⁶

1. Kekuasaan ekslusif yang hanya bisa dijalankan oleh pemerintah federal.
2. Kekuasaan bersama yang dapat dijalankan oleh pemerintah federal maupun oleh pemerintah negara bagian.
3. Kekuasaan sisa adalah semua kekuasaan yang tidak tercantum dalam konstitusi dan dijalankan oleh pemerintah negara bagian.

³ Sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari atas dua kamar atau dua badan legislatif. Lihat Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 150.

⁴ Richard Chauvel H, “Politics Down Under: Kehidupan Politik dalam Negeri Australia”, dalam Sujinah Harlinah dan Ismu (Ed), *Budaya dan Politik Australia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995, hlm. 1.

⁵ Konstitusi persemakmuran Australia adalah sebuah undang-undang yang disahkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1900. Konstitusi tersebut dihasilkan melalui serangkaian perundingan dan konferensi yang berkepanjangan antara enam daerah koloni di Australia dan pemerintah Inggris. Lihat *ibid.*, hlm. 3.

⁶*Ibid*, hlm. 4.

Australia juga memiliki parlemen yang terdiri dari dua badan yaitu *Senate* (Senat)⁷ dan *House of Representative* (HoR)⁸. Kehidupan politik di parlemen didominasi oleh persaingan antara dua partai politik utama. yaitu Partai Buruh (*Labor Party*) dan Partai Liberal-Country (*Liberal-Country Party*).⁹ Partai-partai ini mempunyai banyak persamaan salah satunya struktur organisasinya bersifat federal. Partai buruh adalah partai tertua di Australia.¹⁰ Partai ini berkembang dari sebuah pemogokan masal yang gagal pada permulaan tahun 1890-an. Sedangkan asal-usul Partai *Liberal-Country* ini adalah pengelompokan borjuis di dalam parlemen pada akhir abad ke-sembilan sebagai reaksi terhadap munculnya Partai Buruh.

⁷ Lembaga pertama yaitu *Senate* disebut juga dengan majelis tinggi. Para anggotanya, yang lebih dikenal dengan senator merupakan perwakilan negara-negara bagian Australia. Para Senator dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan pasal 7 Konstitusi Australia dan dilaksanakan 3 tahun sekali. Senator dipilih untuk masa jabatan 6 tahun dan harus disahkan oleh Gubernur Jendral. Lihat Amzulian Rifai, *Pengantar Konstitusi Australia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 21.

⁸ Lembaga kedua adalah *House of Representative*, yang memiliki pengertian sama dengan majelis rendah atau DPR. Keanggotaan kelompok ini memang dipilih secara langsung oleh rakyat Australia. Lembaga ini dipilih melalui sistem pemilihan umum yang berbeda, pemilihan umum ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali yang waktunya ditentukan oleh Perdana Menteri. *House of Representative* terdiri dari 148 anggota yang telah dipilih berdasarkan Sistem Distrik. lihat *ibid.*, hlm. 4.

⁹ Partai *Liberal-Country* merupakan gabungan antara Partai Liberal dan Partai Country biasanya berkoalisi untuk menghadapi Partai Buruh dan biasa disebut *Non-Labor Coalition*. Lihat J. Siboro, *Sejarah Australia*, Jakarta: Depdikbud, 1989, hlm. 149.

¹⁰ Richard Chauvel. H, *op.cit.*, hlm. 17.

Australia adalah negara yang kaya akan sumber alam, terisolasi, berpenduduk jarang dan sangat bergantung pada perdagangan dan akses di pasar-pasar internasional yang jauh. Sejak masa koloni, Australia telah menjadi pemasok bahan-bahan pertambangan, produk-produk pertanian, serta barang-barang industri bagi pasar Inggris. Pasar-pasar tujuan eksportnya bervariasi dan jauh dari negerinya, yaitu Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia. Perdagangan luar negeri ini dapat dipertimbangkan sebagai kepentingan nasional yang utama.

Ada dua faktor yang menentukan dalam menimbang kebijakan luar negeri Australia, yaitu faktor geografis dan sejarah Australia.¹¹ Kedua faktor tersebut terus-menerus ikut menentukan kebijakan luar negeri Australia dan juga bertanggung jawab atas fokus yang tetap untuk melindungi kebutuhan-kebutuhan keamanan Australia.

Sejak Perang Dunia II berakhir, Australia mulai berusaha untuk mengalihkan perhatiannya ke wilayah Asia Tenggara terutama ke negara tetangga terdekatnya yaitu Indonesia. Hal ini karena posisi yang ditempati Australia sangat strategis di tengah kawasan Asia Tenggara. Politik luar negeri yang dijalankan Australia pun berkaitan dengan keamanan negaranya, karena ketakutan terhadap serangan asing menjadi kekhawatiran Pemerintah Australia.

Hubungan Indonesia-Australia senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu yang banyak melibatkan citra kedua negara sehingga tidak dapat dihindarkan terbentuknya persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Persepsi yang keliru tersebut kadangkala menjurus ke arah krisis. Secara geografis di mana kedua

¹¹ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Jakarta: LIP- FISIP UI & Remaja Rosda karya, 1999, hlm. 387.

negara bertetangga memaksa mereka untuk menghindarkan perbedaan mendasar dalam evaluasi jangka panjang mengenai konsep strategis yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri.

Hubungan awal Australia dengan Indonesia pada tahun 1945-1949, tepatnya ketika Partai Buruh berkuasa hubungan kedua negara relatif sangat dekat. Secara historis ada beberapa tahapan perkembangan sikap Australia terhadap Indonesia, yaitu sikap yang memihak Belanda kemudian berbalik simpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada tahap awal kemerdekaan Indonesia dukungan, Australia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan oleh kaum buruh pelabuhan Australia, mereka melakukan aksi boikot terhadap kapal-kapal Belanda yang mengangkut senjata dan amunisi ke Indonesia.¹² Aksi ini tentu saja segera menarik perhatian dunia tentang masalah Indonesia. Sikap Australia ini menimbulkan simpati yang sangat dalam terhadap para pemimpin nasionalis Indonesia.

Australia bahkan menentang dan mengutuk dua aksi militer yang dilancarkan Belanda terhadap Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Australia dalam perundingan gencatan senjata antara Indonesia-Australia, bahkan Australia kemudian dipilih oleh Indonesia untuk duduk dalam Komisi Tiga Negara (KTN)¹³ sebagai wakil Indonesia.

¹² Kedutaan Besar Australia, *op.cit.*, hlm. 39.

¹³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 137.

Akan tetapi sikap Australia terhadap Indonesia kemudian berubah lagi setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia-Belanda, karena Indonesia menuntut atas wilayah Irian Barat.¹⁴ Hubungan yang baik antara Australia dan Indonesia yang telah dibina dari tahun 1947-1949 nampak ada perubahan pada awal tahun 1950-an karena masalah Irian Barat. Selanjutnya Masalah Irian Barat inilah yang menjadi masalah utama yang harus ditangani oleh Pemerintah Partai *Liberal-Country* dalam mewujudkan kebijakan politik luar negerinya terhadap Indonesia.

Permasalahan Irian Barat baru selesai pada tahun 1962 atas desakan PBB dan Amerika Serikat dengan diadakannya perundingan antara Belanda dan Indonesia. Puncak perundingan antara Indonesia dan Belanda ini adalah disepakatinya Persetujuan New York¹⁵ yang ditandatangani kedua pihak yang bersengketa di markas PBB.

¹⁴ Nama Irian atau sekarang yang dikenal dengan Papua, pada 200 M seorang ahli Geografi Ptolamny menyebut dengan nama *Labadios*. Pada 1300 M Kerajaan Majapahit menyebutnya Wanin dan Sram, orang Tidore atau Maluku menyebutnya Papa-ua. pada masa Pemerintahan Belanda *Nederlands Nieuw Guinea*, pada masa Pemerintahan Sementera PBB (UNTEA), digunakan dua nama, *West New Guinea/West Irian*. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1963, Republik Indonesia menggunakan nama Irian Barat. Pada tahun 1973 pemerintah merubah menjadi Irian Jaya. Pada tahun 2000 Irian Jaya berubah nama lagi menjadi Papua berdasarkan UU No.45 Tahun 1999. Lihat Ninati Apainop, *Tentang Nama Papua*, 6 Januari 2008, Tersedia pada <http://digoel.wordpress.com/2008/01/06/tentang-nama-papua/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2010 pukul 11.44

¹⁵ Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002, hlm. 179.

Pada periode 1963-1966 itu juga periode yang menegangkan antara Indonesia dan Australia. Hal ini disebabkan dibentuknya Federasi Malaysia.¹⁶ Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa Malaysia hanyalah sekedar alat untuk mempertahankan kekuasaan Inggris di kawasan Asia Tenggara, ini merupakan proyek neokolonialis Inggris untuk melindungi kepentingan strategis dan ekonominya. Lebih dari itu, pembentukan Malaysia merupakan ancaman potensial bagi keamanan Indonesia, karena Singapura tetap menjadi pangkalan Inggris di bawah Persetujuan Pertahanan Inggris-Malaya.¹⁷

Reaksi awal pemerintah Australia terhadap pernyataan Indonesia mengenai konfrontasi untuk melawan usul pembentukan Federasi Malaysia adalah memperkecil ketegangan yang diakibatkan oleh pernyataan pemerintah Indonesia. Australia bersikap hati-hati, dan mempunyai banyak pertimbangan. Salah satunya komitmen Australia untuk mendukung Malaysia, karena baik Australia maupun Malaysia adalah anggota Persemakmuran Inggris.

Pasang surut hubungan Australia-Indonesia memang menarik untuk dibahas, hal ini tidak lepas dari kebijakan politik luar negeri kedua negara yang mempunyai kepentingan terhadap negaranya. Namun, penulis disini akan mengkaji dan menganalisis kebijakan politik luar negeri Australia terhadap

¹⁶ Federasi Malaysia sebelum terbentuk adalah suatu Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri dari 11 negara bagian yang membentuk satu Inggris koloni mahkota dikenal sebagai Malaya. Pada 1961 Tengku Abdul Razak melontarkan ide membentuk Federasi Malaysia ketika berbicara di depan wartawan di Singapura. Lihat Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 85.

¹⁷ Hilman Adil, *Kebijaksanaan Australia terhadap Indonesia 1962-1966*, Jakarta: CSIS, 1997, hlm. 22.

Indonesia (1949-1966). Hal ini disebabkan pada periode tersebut hubungan Indonesia dan Australia mengalami kerenggangan dengan adanya permasalahan Irian Barat dan pembentukan Federasi Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, skripsi yang berjudul “Politik Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia 1949-1966” dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan Australia-Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah Irian Barat?
3. Bagaimana kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah Konfrontasi Indonesia-Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum
 - a. Mengembangkan sikap berpikir, analitis, dan objektif terhadap sejarah.
 - b. Sebagai sarana yang efektif dalam mengaplikasikan metode penelitian sejarah.
 - c. Mengembangkan dan menambah wawasan dalam bidang sejarah, terutama tentang penelitian sejarah.

2. Tujuan khusus

- a. Memberi gambaran tentang hubungan Australia-Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia.
- b. Mengetahui kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah Irian Barat.
- c. Mengetahui kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

- a. Pembaca dapat mengetahui hubungan Australia-Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia.
- b. Memperluas wawasan pembaca mengenai kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah Irian Barat.
- c. Memperluas wawasan pembaca mengenai kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

2. Bagi Penulis

- a. Penelitian skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta .
- b. Tolak ukur bagi penulis terhadap kemampuan dalam menangkap, memahami dan menganalisis peristiwa sejarah dalam bentuk karya tulis ilmiah.

- c. Penulis memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang politik luar negeri Australia terhadap Indonesia (1949-1966).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang penting dan diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini dimaksudkan supaya penulis dapat memperoleh data-data atau informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai permasalahan yang dikaji. Selain itu kajian pustaka juga bisa diartikan sebagai telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.¹⁸ Penulisan skripsi ini, ditemukan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian pustaka.

Hubungan Indonesia-Australia yang dijalin pada awal kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan relatif memiliki hubungan baik. Pada periode 1945-1949 ini dukungan Australia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia terhadap Belanda ini jelas begitu nyata. Misal ketika Belanda melakukan aksi polisional yang pertama pada tahun 1947, Australia mempermasalahkan dan membawa ke Sidang Majelis Dewan Keamanan PBB. Ketika proses perdamaian itu Australia dipercaya Indonesia sebagai wakil Indonesia dalam Komisi Tiga Negara atau yang dikenal dengan KTN. Untuk mengkaji hubungan Australia-Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia ini sebagai referensi penulis menggunakan buku dari George Margaret yang berjudul *Australia and the Indonesia Revolution* di

¹⁸ Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE UNY, 2006, hlm. 3.

alihbahasakan oleh Hermawan Sulistyo dan Wardah Hafidz yaitu “Australia dan Revolusi Indonesia” diterbitkan di Jakarta oleh Panja Simpati pada tahun 1986.

Perubahan politik dalam negeri Australia tahun 1949 yaitu pergantian Perdana Menteri Ben Chifley dari Partai Buruh digantikan oleh Robert Menzies dari Partai *Liberal-Country* pada 19 September 1949. Hal ini sangat mempengaruhi mengenai perubahan Politik Luar Negeri Australia terhadap Indonesia. Dapat dilihat dari sikap Australia dalam masalah Irian Barat dan konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Pada pemerintahan Partai Buruh menerapkan kebijakan “lepas tangan”¹⁹ sedangkan sikap pada pemerintahan Partai *Liberal-Country* menolak atas klaim Indonesia atas Irian Barat karena Australia beranggapan bahwa dari segi hukum masalah Irian Barat belum ditentukan sebab Konferensi Meja Bundar gagal menyelesaikan masalah ini. Untuk membahas hubungan Australia pada awal kemerdekaan Indonesia dan masalah Irian Barat, penulis menggunakan buku karangan Hilman Adil dalam yang berjudul *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962* yang diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Djambatan pada tahun 1993.

Kebijakan Australia dalam masalah Irian Barat ini telah menjadi sesuatu yang besar karena Australia beranggapan bahwa jika Irian Barat jatuh ke tangan Indonesia sangat mempengaruhi keamanan Australia. Maka dari itu Australia mendukung Belanda dalam masalah Irian Barat. Untuk mengkaji bab ini penulis juga menggunakan buku dari Susan Critchley yang berjudul *Australian Relations with Indonesia: What Went Wrong* di alihbahasakan oleh Sugiarta Sriwibawa

¹⁹ Australia bisa menerima kedaulatan Belanda maupun Indonesia atas kawasan Irian Barat. Lihat Hilman Adil, *op.cit.*, hlm. 131.

yaitu “Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan” yang diterbitkan di Jakarta oleh Universitas Indonesia Press pada tahun 1995.

Masalah konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia disebabkan keinginan Malaysia untuk mendirikan Federasi Malaysia dan bergabung dalam Negara Persemakmuran Inggris. Hal ini tentu saja ditolak Indonesia karena Indonesia beranggapan dibentuknya Federasi Malaysia merupakan proyek dari Neokolonialisme dan Imperialisme Inggris. Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan menggunakan buku dari Departemen Penerangan Indonesia yang berjudul *Gelora Konfrontasi Menggayang Malaysia* yang diterbitkan oleh di Jakarta oleh penerbit Departemen Penerangan RI tahun 1964 dan buku Hilman adil lainnya yang berjudul *Kebijaksanaan Australia terhadap Indonesia 1962-1966: Studi Kasus keterlibatan Australia dalam Konflik Bilateral* yang diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Centre For Strategic And International Studies (CSIS) pada tahun 1997.

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi merupakan suatu rekonstruksi peristiwa masa lampau memerlukan sumber sebagai modal dasar terciptanya karya tulis. Historiografi yang relevan merupakan hal yang pokok diantara tugas-tugas lain yang harus dikerjakan sebelum penulisan sejarah. Historiografi adalah rekonstruksi imajinatif

dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau.²⁰

Hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan sejarah dinamakan historiografi yang relevan. Maksud dari historiografi yang relevan dalam hal ini adalah suatu kerja untuk mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh seorang sejarawan. Selanjutnya ditetapkan posisi penulisan skripsi ini terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Dalam pencarian sumber, peneliti menemukan beberapa tulisan yang bisa dijadikan sebagai historiografi yang relevan bagi penulisan skripsi ini. Beberapa sumber yang digunakan, di antaranya berkaitan dengan topik penelitian, antara lain sebagai berikut:

Pengaruh Konflik Indonesia Belanda mengenai Irian Barat terhadap Hubungan Australia Indonesia (1945-1962) adalah skripsi dari Andi Kurniawan, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai konflik Indonesia-Belanda dalam masalah Irian Barat dan pengaruhnya dalam hubungan diplomatik antara kedua negara. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada kebijakan pemerintah Australia dalam menyikapi masalah Irian Barat, dan kebijakan politik luar negerinya dalam masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Skripsi yang kedua yang digunakan penulis berjudul *Konfrontasi Indonesia-Malaysia dalam Konsepsi Politik Luar Negeri Bebas Aktif* adalah

²⁰ Louis Gottschalk, “Understanding History: A Primer of Historical Method”, a.b, Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975, hlm. 35.

skripsi yang ditulis oleh Endang Wahyuningsih, jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam skripsi ini Endang Wahyuningsih membahas mengenai politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam hubungan internasional termasuk sikap Indonesia dalam pembentukan federasi Malaysia (konfrontasi Indonesia-Malaysia) yang merupakan bentuk penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif. Sikap Indonesia pada saat itu juga membuat poros Jakarta-Peking-Hanoi. Sedangkan yang membedakan antara penelitian ini dengan skripsi Endang wahyuningsih adalah penelitian ini lebih menitiberatkan pada kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia, yang pada saat itu Australia merupakan bagian dari negara Persemakmuran Inggris.

Tulisan ketiga yang digunakan oleh penulis sebagai historiografi adalah karya dari Warjo, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Karya ini berjudul *Analisis Hubungan Australia-Indonesia 1945-1992*. Dalam skripsinya Warjo menjelaskan tentang hubungan Australia-Indonesia, permasalahan kedua negara sejak tahun 1945-1992 dan upaya pemulihan hubungan kedua negara. Sedangkan fokus kajian dalam skripsi ini lebih menitikberatkan kepada kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah Irian Barat, dan sikap pemerintah Australia terhadap masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Sejarah memiliki metode sendiri dalam mengungkapkan peristiwa sejarah masa lampau. Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.²¹ Sejarah sebagai ilmu terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta. Secara positif sejarah mengkaji tentang waktu dan tentang sesuatu yang memiliki makna sosial. Selain itu sejarah juga mengkaji tentang sesuatu yang tertentu dan satu-satunya (unik) dan terinci.

Pada tahap pertama penulisan sejarah seorang sejarawan harus mengumpulkan data-data yang sistematis dan evaluasi yang objektif dari data yang berkaitan dengan kejadian-kejadian masa lampau. Hal ini untuk menguji kebenaran sebab akibat dari kejadian tersebut yang dapat membantu menerangkan kejadian masa kini dan mengantisipasi masa yang akan datang. Metode sejarah juga merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi serta penyajian sejarah.²² Menurut Kuntowijoyo, tahapan penelitian

²¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 43-44.

²² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hlm. xii.

sejarah mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan penulisan.²³

- a. *Pemilihan topik*, merupakan sebuah langkah awal dalam sebuah penelitian untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji. Penentuan topik ini harus dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional.²⁴ Dua syarat tersebut sangat penting karena akan berpengaruh pada aspek subjektif dan objektif, sebab seorang peneliti akan bekerja dengan baik apabila peneliti tersebut senang dengan topik yang ada dan mampu menyelesaikan penelitian. Topik yang dipilih dalam penelitian adalah topik kesejarahan yang *workable*, yaitu dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia. Penentuan topik penelitian ini telah dipertimbangkan dengan beberapa faktor pendukung untuk penyelesaian penelitian. Faktor tersebut diantaranya adalah minat dan kemampuan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
- b. *Heuristik* yaitu usaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam rangka mendukung rekontruksi peristiwa masa lampau. Menurut Kuntowijoyo heuristik merupakan kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah disebut juga sebagai data sejarah, yang di dalam bahasa Inggris disebut *datum* (bentuk tunggal) dan *data* (bentuk jamak). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005, hlm. 91.

²⁴ *Ibid*, hlm. 92.

peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau.²⁵ Sumber sejarah yang dikumpulkan haruslah sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Berdasarkan bahannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis . Dokumen dapat berupa surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja, sedangkan sumber tidak tertulis dapat berupa foto-foto, bangunan dan alat-alat.²⁶

Sumber sejarah yang digunakan di dalam skripsi ini adalah sumber tertulis yang didapatkan melalui penelusuran pustaka berupa buku-buku, jurnal, dari berbagai perpustakaan yakni Unit Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah UNY, Perpustakaan St.Ignatius, Perpustakaan Jurusan FIB UGM, Perpustakaan FISIPOL UGM, Perpustakaan IKIP PGRI Yogyakarta dan Perpustakaan jurusan Ilmu HI UPN. Serta sumber-sumber internet yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan, diantaranya adalah situs arsip resmi Negara Australia (www.naa.gov.au) dan situs resmi Perdana Menteri yang pernah menjabat di Australia (www.primeministers.naa.gov.au).

Sumber-sumber yang beraneka ragam kemudian dikategorikan berdasarkan sifatnya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Primer

Menurut Louis Gottschalk sumber primer merupakan kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra yang lain,

²⁵ Helius Sjamsuddin & Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud, 1993, hlm. 61.

²⁶ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 95-97.

atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya yang selanjutnya disebut sebagai saksi mata.²⁷ Sumber primer harus diperoleh dari sumber yang dihasilkan oleh seseorang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan, sumber primer itu tidak selamanya harus asli. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak menggunakan sumber primer dikarenakan oleh keterbatasan penulis dalam menelusuri sumber-sumber tersebut disebabkan jauhnya lokasi penelitian.

2. Sumber Sekunder

Menurut Louis Gottschalk sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan-mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari orang kedua bukan orang pertama. Meskipun demikian, sumber sekunder juga penting diperoleh guna menyempurnakan historiografi atau penulisan sejarah. Sumber-sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

Critchley, Susan. (1995). "Australian Relations with Indonesia: What Went Wrong", a.b, Sugiarta Sriwibawa. *Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan*. Jakarta: UI Press.

Departemen Penerangan RI (1964).*Gelora Konfrontasi Mengganjang Malaysia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Hadi Soebadio. (2002). *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

²⁷ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 35.

Hilman Adil. (1993). *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan.

Hilman Adil. (1997). *Kebijaksanaan Australia terhadap Indonesia 1962-1966*. Jakarta: CSIS.

Margaret, George. (1986). “Australia and the Indonesia Revolution”. a.b, Hermawan Sulistyo dan Wardah Hafidz. *Australia dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Panja Simpati.

Mukmin, Hidayat. (1991). *TNI dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Harapan.

- c. *Verifikasi (Kritik Sumber)* merupakan kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan reabilitas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan intern.²⁸ Pada tahap pertama kritik ekstern berkaitan dengan otentisitas sumber. Otentisitas adalah mencoba mencari jawaban terhadap keaslian dan keutuhan sumber yang dipakai. Selain dokumen, artifak, sumber lisan dan sumber kuantitatif juga harus dibuktikan keasliannya. Menurut Helius Sjamsuddin kritik ekstern merupakan suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin.²⁹ Pada tahap yang kedua kritik intern bisa dikatakan sebagai pengujian atas isi sumber. Langkah ini dilakukan untuk membuktikan apakah kesaksian dan pernyataan pelaku dapat diandalkan atau tidak. Kritik intern berkaitan dengan kredibilitas sumber dimana sumber yang dimaksud dapat dipercaya kebenarannya. Penulis juga harus melakukan perbandingan dari sumber yang telah dikumpulkan .

²⁸ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 100-101.

²⁹ Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 135.

- d. *Interpretasi* Merupakan kegiatan analisis yang didapatkan dari sumber yang telah dikumpulkan dan diverifikasi. Interpretasi dikatakan sumber subjektivitas, hal ini dikarenakan dalam interpretasi diperlukan sebuah imajinasi kreatif dari sejarawan untuk membuat sebuah data dapat bicara. Tahap interpretasi ini terbagi dalam dua langkah yaitu analis dan sintesis. Analis ialah kegiatan untuk menguraikan, sedangkan sintesis berarti mengumpulkan.³⁰ Pada tahap interpretasi penulis berusaha menguraikan sumber dan mengaitkan fakta-fakta sejarah yang telah didapat, kemudian mengolah dan menganalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan, sehingga mempunyai arti dan bersifat logis.
- e. *Historiografi*, merupakan kegiatan penyampaian sintesis dari penelitian yang ditulis secara kronologis. Dalam tahap ini penyajian penelitian disampaikan dalam bentuk ilmiah baik dalam sistematika maupun gaya bahasanya. Hal ini disesuaikan dengan maksud dari penelitian yaitu penelitian skripsi. Historiografi adalah tahapan akhir penulis untuk menyajikan semua fakta ke dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul “Politik Luar Negeri Australia terhadap Indonesia (1949-1966)”.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah terjadi dimasa lampu. Penulisan sejarah memerlukan pendekatan multidimensional untuk memperkuat makna peristiwa masa lampau guna mendekati suatu peristiwa dalam berbagai aspek kehidupan.

³⁰ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 102-103.

Suatu peristiwa tidak terjadi karena satu sebab melainkan karena beberapa sebab. Berbagai sebab ini saling mempengaruhi, sehingga pendekatan yang multidimensional diharapkan mampu mengkaji secara komprehensif persoalan-persoalan sejarah. Berdasarkan pertimbangan perlunya metode pendekatan dalam penelitian sejarah, maka penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan sesuai konteks yang dibicarakan.

Pendekatan geografi, merupakan pendekatan dari sisi letak dan fungsi suatu wilayah. Peristiwa sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan spasial. Sejarah dan geografi diumpamakan sebagai panggung dan lakon. Pendekatan ini berguna untuk menyoroti kondisi wilayah Australia yang secara geografis berbatasan dengan Indonesia sehingga mempengaruhi pola pikir orang Australia dan nantinya dalam menetapkan kebijakan politik luar negerinya.

Pendekatan ekonomi adalah penjabaran konsep-konsep ekonomi pola distribusi, alokasi produksi, dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial yang stratifikasinya dapat mengungkap peristiwa atau fakta dalam kehidupan ekonomi sehingga dapat dipastikan hukum dan kaidahnya.³¹ Pendekatan ekonomi dalam skripsi ini digunakan untuk menganalisis kebijakan politik luar negeri Australia dalam hal perdagangan luar negeri yang berpengaruh dalam kebijakan Australia terhadap Indonesia.

Pendekatan politik, menurut Sartono Kartodirdjo tinjauan politik adalah tinjauan yang mengarah pada struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hirarki,

³¹ Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1996, hlm. 33.

sosial, pertetangan dan lain sebagainya.³² Pendekatan politik dalam hal ini untuk mengungkapkan kebijakan-kebijakan politik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia pada tahun 1949-1966.

Pendekatan militer, memahami adanya sekelompok orang yang diorganisasikan dengan militer yang memiliki tujuan untuk bertempur dan memenangkan perang guna mempertahankan ideologi dan memelihara eksistensi negara. Skripsi ini menggunakan pendekatan militer untuk menyoroti kekuatan militer Indonesia dan Australia atas munculnya masalah Irian Barat dan konfrontasi Indonesia-Malaysia.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat secara keseluruhan mengenai isi skripsi yang berjudul “Politik Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia (1949-1966)”

Bab pertama peneliti menguraikan latar belakang masalah tujuan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan historiografi yang relevan, metode penelitian, kajian pustaka dan historiografi yang relevan, metode dan pendekatan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua ini membahas hubungan awal kedua negara pada masa kemerdekaan Indonesia, ketika itu Australia mendukung Indonesia dalam memperoleh kedaulatan negaranya dari Belanda tetapi dibalik dukungan itu

³² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 4.

Australia mempunyai kepentingan tersendiri. Hubungan ini juga dipengaruhi karena letak geografis Australia dan Indonesia yang berdekatan. Pada akhir Desember 1949, terjadi pergantian pemerintahan dari Partai Buruh ke Partai *Liberal-Country* membuat kebijakan politik luar negeri dipegang oleh Perdana Menteri Robert Menzies.

Bab ketiga membahas mengenai kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah Irian Barat, latar belakang kebijakan ini dipengaruhi persengketaan antara Indonesia dan Belanda mengenai status kepemilikan wilayah Irian Barat. Selain itu dibahas keterlibatan Australia, kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah Irian Barat dan yang terakhir akhir dari masalah Irian Barat.

Bab keempat membahas mengenai kebijakan politik luar negeri Australia terhadap dibentuknya Federasi Malaysia. Latar belakang masalah ini disebabkan pernyataan ingin membentuk negara federasi yang meliputi Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Masalah berkembang ketika Tengku Abdul Rahman berkonsultasi dengan Inggris. Selain itu dijelaskan keterlibatan Australia, kebijakan politik luar negeri Australia terhadap masalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan Akhir dari konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Bab kelima berisi kesimpulan tentang apa yang sudah disampaikan dalam penulisan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalah pokok yang disajikan dalam rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN